

IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA ANTAR KERJA ANTAR DAERAH DI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

Adinata Teguh. YP

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : adinata_teguh@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan program Akad pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dan hambatan-hambatan yang terjadi selama proses implementasi program Akad. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, dan studi dokumentasi. Lokasi penelitian pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Subjek Penelitian adalah bidang tenaga kerja Dinsosnakertrans, tenaga kerja akad dan non akad, serta pihak perusahaan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya pelaksanaan program akad dalam pencarian tenaga kerja dari luar daerah hal ini disebabkan karena tenaga kerja yang disalurkan melalui program akad belum semua dapat terpenuhi, masih kurangnya sumber daya manusia (aparatur) yang menangani program ini, selain itu hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan mengakibatkan terhambatnya proses pelaksanaan program, selain dari pada itu prosedur yang rumit dan berbelit-belit membuat pihak perusahaan enggan melakukan pencarian tenaga kerja melalui program ini.

Kata kunci: Implementasi, program akad, tenaga kerja, pihak perusahaan.

Abstract

This study aims to determine how the process of program implementation the Agreement on Social Service Manpower Sintang and obstacles that occur during the process of program implementation AKAD. This study uses a qualitative descriptive approach. Data collection techniques are interviews, and documentation. Location of the study at the Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sintang Regency. The research subject is Dinsosnakertrans field labor, labor contract and non contract, as well as the company. The conclusion of this study is not optimal implementation of the contract program in search of labor from outside the region and this is because labor is channeled through the contract program can not all be met, there is still a lack of human resources (personnel) that handles this program, in addition to the barrier-barriers that occur in the field resulted in delays in the conduct of the program, except that the procedures are complicated and convoluted to make the company reluctant to search workforce through this program.

Keywords: Implementation, program contract, labor, corporate parties.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Ketenagakerjaan merupakan satu unsur terpenting dalam proses suatu produksi, tanpa adanya tenaga kerja suatu usaha tidak dapat berjalan meskipun memiliki bahan produksi yang lengkap sekalipun, hal ini dikarenakan tidak ada yang dapat mengolah seluruh bahan produksi tersebut, berbeda dengan negara yang telah maju, meskipun minim akan tenaga kerja, mereka masih tetap dapat melaksanakan proses produksi, hal ini dikarenakan negara tersebut banyak menggunakan teknologi dibanding tenaga manusia.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi nasional dan khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia, selain itu dengan tingginya angka pengangguran maka semakin tinggi pula angka kemiskinan dan tindak kejahatan yang terjadi. Dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan menerapkan berbagai program pembangunan pada sektor ekonomi dan sektor ketenagakerjaan pada kelompok penduduk miskin, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Semakin berkembangnya daerah Kabupaten Sintang membuat banyaknya perusahaan-perusahaan yang masuk untuk berinvestasi di wilayah tersebut, akan tetapi seiring masuknya perusahaan tersebut ke daerah, pihak perusahaan pun merasa sulit untuk mendapatkan tenaga kerja untuk dapat dipekerjakan di perusahaan yang mereka miliki. Hal ini juga terlihat dari data yang diterima dari

dinas sosial tenaga kerja tentang masih sedikitnya masyarakat yang mencari pekerjaan.

Table. 1.1. Jumlah Pencari kerja dari tahun 2006-2010

Table				
Banyaknya pencari kerja dari tahun 2006 – 2010				
No.	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	2010	215	187	402
2.	2009	300	277	577
3.	2008	96	47	143
4.	2007	124	66	190
5.	2006	109	91	200

Sumber : Sintang Dalam Angka 2011

Berdasarkan table 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah pencari kerja yang ada pada daerah Kabupaten Sintang masih sangat sedikit, jumlah investor yang semakin meningkat mengakibatkan semakin banyaknya akan kebutuhan tenaga kerja, sementara tenaga kerja yang ada di daerah sangat minim dan tidak dapat menutupi kekurangan akan tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan yang ada. Pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu tidak sepenuhnya bekerja pada satu tempat kerja atau perusahaan saja, pencari kerja yang terdaftar tersebut mencari kerja di berbagai lapangan kerja yang ada di wilayah Kabupaten Sintang.

Sejalan dengan masih banyaknya dibutuhkan tenaga kerja oleh perusahaan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hal inilah yang membuat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi merasa perlu untuk mengimplementasikan program dari Kementerian

Tenaga Kerja Pusat tersebut. Program AKAD merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan iklim dan perluasan kesempatan kerja, program ini di rancang Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dimana Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan suatu Peraturan Menteri Nomor PER. 07/MEN/IV/2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja dan diperkuat oleh Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja yang terkait langsung dengan pelayanan penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (TK-AKAD) yaitu Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Depnakertrans RI No. Kep. 258/DPPTK/IX/2008 Tentang Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD).

Program yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat tersebut dilaksanakan oleh daerah Kabupaten Sintang, dimana pemerintah menjalankan program ini karena permintaan oleh perusahaan atas tenaga kerja yang dapat bekerja di perusahaan mereka. Kebutuhan tenaga kerja oleh perusahaan ini sehingga perusahaan melakukan suatu kerjasama kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja untuk mendapatkan tenaga kerja dari luar daerah. Berdasarkan peraturan yang ada selanjutnya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang melakukan koordinasi kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi sehingga laporan kebutuhan tenaga kerja tersebut dapat diteruskan kepada kementerian pusat untuk ditindaklanjuti. Dengan masuknya permintaan atas tenaga kerja tersebut di kementerian pusat, maka Kementerian pusat akan menindaklanjuti atas permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh daerah terkait dengan memberikan informasi daerah atau provinsi yang memiliki ketersediaan tenaga kerja yang dapat bekerja di daerah

lain melalui prosedur AKAD. Setelah mendapatkan daerah yang dapat mengirimkan tenaga kerja tersebut, maka Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sintang beserta pihak perusahaan yang mencari tenaga kerja melakukan penjemputan terhadap calon tenaga kerja yang berada di daerah yang telah di tunjuk oleh Kementerian yang memiliki tenaga kerja. Sebelum membawa tenaga kerja ke daerah Kabupaten Sintang, pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebelumnya melakukan penataran atau pembekalan terhadap calon tenaga kerja yang akan mereka bawa, penataran atau pembekalan ini berkaitan tentang situasi dan kondisi yang ada di tempat mereka bekerja nanti, sehingga nantinya mereka dapat menyesuaikan diri dengan daerah tempat mereka bekerja. Setelah melakukan penataran tersebut maka pihak dinas sosial dan perusahaan dapat membawa pekerja yang telah mengikuti penataran dan memiliki prosedur yang telah ditetapkan dan di pekerjakan di daerah Kabupaten Sintang.

Selama pelaksanaan program AKAD, masih banyak tenaga kerja yang diminta oleh pihak perusahaan melalui Akad tidak dapat di penuhi oleh pemerintah, jumlah kuota tenaga kerja yang diminta tidak terpenuhi sebagaimana yang diajukan oleh perusahaan. Hal ini yang perlu diketahui apa yang membuat jumlah permintaan tidak dapat didatangkan seluruhnya melalui Akad.

Selain dari pada itu, tidak semua tenaga kerja yang berasal dari luar daerah Kabupaten Sintang yang bekerja di daerah Kabupaten Sintang masuk sesuai dengan ketentuan yang diharapkan, masih banyak pula tenaga kerja yang masuk ke wilayah Kabupaten Sintang untuk bekerja tidak mengikuti program yang telah ditetapkan.

Adinata Teguh. YP

Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tanjungpura

Dalam pelaksanaan program AKAD, hingga saat ini terdapat lebih dari 1000 tenaga kerja yang berasal dari luar daerah yang telah bekerja melalui program AKAD ini, seluruh tenaga kerja yang masuk melalui program Akad tersebut telah di tempatkan di beberapa perusahaan yang ada Kabupaten Sintang. Akan tetapi dari pelaksanaan program ini, terdapat pula cukup banyak tenaga kerja yang berasal dari luar daerah bekerja pada perusahaan-perusahaan yang bekerja di wilayah kabupaten tidak melalui program AKAD, tenaga kerja tersebut lebih memilih langsung bekerja sendiri pada perusahaan tanpa mengikuti program yang telah disediakan oleh pemerintah tersebut. Berdasarkan hasil orientasi lapangan yang telah dilaksanakan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi didapat lebih dari 700 tenaga kerja yang masuk ke wilayah Kabupaten Sintang tanpa melalui program AKAD.

Dengan beberapa hasil penelitian sementara yang di dapat dilapangan, hal ini menggambarkan bahwa program ini belum dapat ter-implementasi sebagaimana mestinya. Hal inilah yang menjadi alasan peneliti untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sehingga Program Akad ini belum berjalan sebagaimana mestinya.

2. Rumusan Permasalahan

Dari penjelasan dalam latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah ialah Bagaimana Proses Implementasi Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dan Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam proses implementasi program AKAD di Kabupaten Sintang ?

3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti ialah :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Proses Implementasi Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam proses implementasi program AKAD

4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi bahan pengkajian bagi semua kalangan dalam mendukung pelaksanaan pelayanan dan pembangunan dalam masyarakat, selain dari pada itu Sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam membuat kebijakan atau program kerja dan sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan atas pelaksanaan program yang dilaksanakan.

B. TEORI DAN METODELOGI

1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu aturan yang mana bertujuan untuk kepentingan publik atau masyarakat. Suatu Negara yang berlandaskan hukum, Indonesia merupakan Negara yang mana setiap warganya memiliki kaitan akan hukum. Sebagai perwujudan pemerintah melaksanakan pembuatan suatu kebijakan dengan tujuan kesejahteraan rakyat seutuhnya, selain daripada itu suatu kebijakan dibuat juga dengan tujuan untuk membuat suatu masyarakat lebih tertib dan teratur.

Menurut Dye (dalam Subarsono, 2006:2) kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Artinya, kebijakan publik lebih mengarah pada pilihan-pilihan, pilihan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya ialah kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja tentang pelayanan penempatan tenaga kerja antar kerja antar daerah, hal ini harus dipikirkan oleh pemerintah daerah terkait suatu ketetapan yang dibuat oleh pusat, apakah perlu dilaksanakan di daerah Kabupaten Sintang atau tidak.

Definisi kebijakan publik dari Thomas dye diatas dapat diambil makna bahwa :

1. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta
2. Kebijakan publik menyangkut perihal apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah

James E. Anderson (dalam Subasono : 2006: 2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Meskipun banyak diketahui bahwa tidak semua kebijakan yang dibuat oleh pihak pemerintah dirancang dan di sahkan sendiri oleh pemerintah, namun banyak pula suatu program kebijakan yang dirancang atas dasar faktor-faktor kepentingan dari luar pemerintahan.

Dari beberapa pengertian kebijakan publik diatas maka dapat disimpulkan bahwa suatu kebijakan perlu untuk di buat dan dilaksanakan, hal ini dikarenakan bahwa suatu kebijakan di buat dan dilaksanakan sesungguhnya karena dirasakan adanya suatu kebutuhan dalam kehidupan. Dimana tujuan daripada pembuatan suatu kebijakan tersebut semata-mata untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat seutuhnya.

2.2. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu bidang kajian yang dinamis, studi implementasi selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dilihat dari pengertiannya Implementasi ialah suatu penerapan dari suatu program yang telah dibuat oleh pemerintah. Suatu kebijakan dibuat untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu (Webster dalam Wahab (2006:64).

Jika pandangan webster dalam wahab tersebut di dilaksanakan dalam penerapan suatu kebijakan, maka implementasi dari kebijakan itu dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk undang – undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan lain-lain).

Jones dalam Gaffar (1997), dalam Joko Widodo, (2008: 89) aktifitas implementasi kebijakan terdapat tiga macam, antara lain sebagai berikut :

1. *Organization; the establishment or rearrangement of resources, units, and methods for putting a policy into effect.* Ialah dimana aktifitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya (*resources*), unit-unit (*units*), dan metode-metode (*methods*) yang mengarah pada upaya mewujudkan, merealisasikan kebijakan menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan apa yang yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.
2. *Interpretation; the translation of language (ofte contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives.* ialah dimana aktifitas interpretasi (*interpretation*) merupakan aktifitas interpretasi (penjelasan) substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.
3. *Application; the routine provision of service, payments, or other agree upon objectives or instruments.* Ialah aktivitas aplikasi (*application*) merupakan aktifitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada.

Menurut Nugroho (2008:432) implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dan untuk mengimplementasikan kebijakan publik itu ada dua pilihan langkah, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Untuk menjamin implementasi dapat berjalan dengan lancar, sebelum kegiatan penyampaian

berbagai keluaran kebijakan dilakukan dengan kelompok sasaran dimulai perlu didahului dengan penyampaian informasi kepada kelompok sasaran. Tujuan dari pemberian informasi ini ialah agar kelompok sasaran tersebut agar memahami kebijakan yang akan diimplementasikan sehingga mereka tidak hanya akan menerima berbagai program yang di inisiasi oleh pemerintah akan tetapi berpartisipasi aktif dalam upaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan. Kegiatan penyampaian informasi ini bisa disebut sebagai kegiatan sosialisasi, sosialisasi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilakukan melalui : ceramah, forum warga, sarasehan, dialog interaktif dan lain-lain. Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung terjadi ketika petugas garda depan dalam mensosialisasikan suatu kebijakan suatu kebijakan tidak berinteraksi secara langsung (*face to face*) tetapi melalui papan pengumuman, pamphlet, spanduk, brosur, iklan, dan lain-lain.

Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman ialah dimana suatu lembaga atau *stakeholder* memahami akan atas apa maksud dari dikeluarkannya program tersebut sehingga mengetahui apa yang seharusnya dilaksanakan untuk pencapaian dari program yang dilaksanakan.

Menurut Agustino (2006:139) implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan (3) adanya hasil kegiatan.

Dari berbagai pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu kebijakan yang telah

dirumuskan dengan proses yang panjang baik itu suatu kebijakan yang dibuat secara nasional maupun daerah dapat berjalan dengan baik ataupun sebaliknya, suatu kebijakan publik memiliki variasi berdasarkan wilayah, tujuan yang ingin dicapai, sasaran yang menjadi tujuan dan harapan yang diinginkan. Hal-hal tersebutlah yang membuat suatu kebijakan memiliki suatu nilai keberhasilan atau tidak dalam pelaksanaannya dilapangan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sintang. Subjek dalam penelitian ini Bidang Tenaga Kerja Dinas Sosial, Pihak Perusahaan, tenaga kerja yang masuk secara tidak resmi dan tenaga kerja yang masuk melalui prosedur AKAD. Selanjutnya, yang menjadi objek penelitian adalah implementasi dari pelaksanaan program AKAD.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses Implementasi

AKAD merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan iklim dan perluasan kesempatan kerja, program ini di rancang Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dimana Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan suatu Peraturan Menteri Nomor PER. 07/MEN/IV/2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja dan diperkuat oleh Keputusan

Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja yang terkait langsung dengan pelayanan penempatan tenaga kerja antar kerja antar daerah (TK-AKAD) yaitu Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Depnakertrans RI No. Kep. 258/DPPTK/IX/2008 Tentang Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD).

Untuk merealisasikan tujuan penelitian ini maka peneliti menggunakan teori Jones dalam proses penelitian, dimana sebagai berikut :

2. *Organization; the establishment or rearrangement of resources, units, and methods for putting a policy into effect.*

Ialah dimana aktifitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya (*resources*), unit-unit (*units*), dan metode-metode (*methods*) yang mengarah pada upaya mewujudkan, merealisasikan kebijakaan menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan apa yang yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.

2. *Interpretation; the translation of language (ofte contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives.* ialah dimana aktifitas interpretasi (*interpretation*) merupakan aktifitas interpretasi (penjelasan) substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.

3. *Application; the routine provision of service, payments, or other agree upon objectives or instruments.* Ialah aktivitas aplikasi (*application*) merupakan aktifitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijaksanaan yang ada.

2. Pengorganisasian Dalam Pelaksanaan Program AKAD

Seperti yang diungkapkan oleh Jones bahwa dalam proses implementasi program sangat ditentukan oleh aktifitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya (*resources*), unit-unit (*units*), dan metode-metode (*methods*) yang mengarah pada upaya mewujudkan, merealisasikan kebijakan menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.

Pada kegiatan organisasi dapat disimpulkan bahwa bidang yang menangani masalah tenaga kerja akad yaitu bidang tenaga kerja pada bagian Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja. Kurangnya akan sumber daya manusia dalam pelaksana membuat pihak pelaksana belum dapat melaksanakan program secara maksimal. Faktor sumber daya manusia seperti pegawai yang dirasakan sangat kurang dalam pelaksanaan program kepada perusahaan, selain dari pada itu pula, sumber daya yang terbatas mengakibatkan pihak dinas kurang efektif dalam melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja

dilapangan, hal ini mengakibatkan pihak pelaksana program tidak mengetahui atas masalah yang terjadi pada tenaga kerja akad dilapangan.

3. Interpretasi Terhadap Program Akad

Pada pokok Interpretasi dapat disimpulkan bahwa dari hasil wawancara yang didapatkan dilapangan bahwa pihak aparaturnya dalam bagian pelaksana program tersebut sudah memahami atas program akan tetapi pihak perusahaan yang melakukan pencarian terhadap tenaga kerja kurang memahami akan apa yang harus mereka lakukan mulai dari persyaratan perekrutan hingga apa yang wajib dipenuhi oleh pihak perusahaan terhadap tenaga kerja yang mereka rekrut.

4. Aplikasi Pelaksanaan Program Akad di Kabupaten Sintang

Dari aplikasi pelaksanaan program Akad dapat disimpulkan pihak perusahaan masih belum mendapatkan tenaga kerja sepenuhnya dari kuota yang mereka minta, hal ini menunjukkan bahwa program yang telah dijalankan tersebut belum dapat mengatasi atas kekurangan tenaga kerja oleh pihak perusahaan hal ini dikarenakan prosedur yang berbelit-belit dan memerlukan waktu yang panjang sehingga membuat pihak perusahaan enggan untuk melaksanakan program akad. Selain dari pada itu masih adanya biaya yang harus ditanggung oleh pihak tenaga kerja yang mana seharusnya pihak tenaga kerja tidak boleh dikenakan biaya sedikitpun.

5. Hambatan dalam pelaksanaan program AKAD

Pada hasil penelitian bagian hambatan ini, bahwa dapat disimpulkan dalam pelaksanaan program akad dilapangan, masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan. Mulai dari sulitnya untuk melaksanakan koordinasi pada pihak kementerian tenaga kerja pusat, dimana sebagai pemberi lokasi dimana tersedianya tenaga kerja akad, selanjutnya belum tersedianya informasi adanya peluang kerja akad pada dinas-dinas pelaksana program akad maupun media massa, sehingga mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui akan adanya peluang kerja di daerah lain, selanjutnya ialah banyaknya prosedur dan rentang waktu pengurusan yang begitu lama membuat pihak perusahaan lebih memilih untuk mencari tenaga kerja sendiri dibanding jika harus melalui prosedur dengan berbagai macam prosedur.

D. Simpulan dan Keterbatasan

1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan :

- a. Pada bagian organisasi : masih kurangnya sumber daya manusia yang ada pada bagian penanganan pelaksanaan progam, sehingga program yang dijalankan belum berjalan secara maksimal, terutama pada tenaga kerja akad yang telah disalurkan, kurangnya evaluasi atau pengecekan terhadap tenaga kerja yang telah disalurkan

mengakibatkan pihak dinas tidak mengetahui apa yang terjadi dilapangan dan Sulitnya koordinasi kepada pemerintah pusat membuat program akad belum bisa berjalan dengan lancar.

- b. Pada bagian Interpretasi : Kurangnya pemahaman pihak perusahaan dalam melaksanakan perizinan akad membuat pelaksanaan akad belum dapat terlaksana tepat waktu karena pihak perusahaan selalu bergantung pada pihak dinas.

- c. Pada bagian aplikasi : Jumlah kuota tenaga kerja akad yang diminta oleh pihak perusahaan belum sepenuhnya terpenuhi oleh pihak pemerintah, selanjutnya masih adanya pihak perusahaan yang meminta biaya kepada para pekerja dalam proses pemberangkatan tenaga kerja akad ke daerah, masih sedikitnya informasi tentang adanya program akad di daerah-daerah mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan adanya pelaksanaan program akad sehingga banyak masyarakat yang bekerja di luar daerah tanpa melalui prosedur akad serta persyaratan dan ketentuan yang berbelit-belit serta prosedur yang panjang mengakibatkan pihak perusahaan enggan melaksanakan program akad dalam mencari tenaga kerja.

2. Keterbatasan

Keterbatasan-keterbatasan penelitian yang penulis alami sebagai berikut:

1. Waktu penelitian yang terbatas membuat peneliti belum dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam atas apa yang diteliti.
2. Pola keasramaan yang membuat peneliti sulit untuk melakukan penelitian diluar karena harus memenuhi prosedur yang ditetapkan, sehingga peneliti sulit untuk mencari informasi karna benturan peraturan yang berlaku.
3. Waktu pelaksanaan Skripsi berbenturan dengan pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) sehingga membuat proses penelitian terhambat karna harus mengikuti kegiatan KKM terlebih dahulu.
4. Peneliti merupakan peneliti pemula sehingga hasil penelitian yang didapatkan belum sebaik yang diharapkan sehingga masih diperlukan pembelajaran.

E. Apresiasi

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengasuh dan pengelola Program Studi Ilmu Pemerintahan kerjasama Universitas Tanjungpura dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan serta seluruh pegawai dinstansakertrans beserta tenaga kerja dan pihak perusahaan yang terlibat dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Buku :

- Agustino Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Bagong suyanto & Sutinah (Ed.). 2011. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Masyhuri, MP & M. Zainuddin. 2008. *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung. PT. Refika Aditama

Adinata Teguh. YP

Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tanjungpura

- Moleong J. Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nazir. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nugroho Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta. PT. Elex media Komputindo.
- Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan. 2011. Prodi IP Fisip Untan
- Purwant Erwan Agus & Dyah Ratih Sulistyastuti . 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sintang Dalam Angka, 2011
- Subarsono AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & B*. PT. Bandung: Reflika Aditama.
- _____. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Suharto Edi. 2012. *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK, Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Tohardi, A. 2008. *Petunjuk Praktis menulis Skripsi*. Bandung: Mandar maju.
- Widodo Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Jawa Timur: Bayumedia

Winarno Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

Peraturan :

Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor. Kep. 258/DPPTK/IX/2008 Tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Anta Daerah.

Peraturan Bupati Sintang Nomor 37 Tahun 2008
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sintang.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor PER.
07/MEN/IV/2008/ Tentang Penempatan
Tenaga Kerja.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ADINATA TEGUH. YP
NIM / Periode lulus : E42009030 / 2013
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : adinata_teguh@yahoo.co.id / 085750756696

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA ANTAR
KERJA ANTAR DAERAH DI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ditetujui
Pengelola Jurnal Prodi IP

H. Wijaya Kusuma, MA, Ph.D
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 30 Agustus 2013

(ADINATA TEGUH.YP)